

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kegagalan upaya reunifikasi sebagian besar disebabkan oleh perbedaan ideologi dan sistem politik yang mendasar antara kedua negara, yaitu komunisme otoriter di Korea Utara dan demokrasi liberal di Korea Selatan. Selain itu, ketegangan militer yang terus berlanjut serta sanksi internasional yang diberlakukan terhadap Korea Utara turut menghambat proses reunifikasi. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk mendamaikan kedua negara, seperti pertemuan tingkat tinggi dan kesepakatan bilateral, ketidakpercayaan yang mendalam dan perbedaan kepentingan politik membuat reunifikasi menjadi semakin sulit dicapai. Dalam analisis ini, penulis juga menyoroti bahwa Korea Utara, di bawah kepemimpinan Kim Jong-un, cenderung mempertahankan sikap keras terhadap Korea Selatan dan lebih fokus pada penguatan posisi militer dan ideologi nasionalnya, sehingga mengesampingkan kemungkinan reunifikasi damai yang menguntungkan kedua belah pihak.

Selama periode 2020-2024, kebijakan Korea Utara memainkan peran sentral dalam menghambat upaya reunifikasi dengan Korea Selatan. Pendekatan agresif yang ditunjukkan oleh Korea Utara, termasuk pengembangan program nuklir dan retorika provokatif, menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk dialog damai dan kerja sama antara kedua negara. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan ketegangan militer di Semenanjung Korea, tetapi juga memperdalam perbedaan ideologis dan budaya yang sudah ada, sehingga memperburuk situasi. Upaya diplomatik yang dilakukan untuk menjembatani perbedaan ini gagal membuahkan hasil yang signifikan, sebagian besar karena Korea Utara tetap bersikukuh pada kebijakan-kebijakan yang mempertahankan kekuatannya di kancah internasional, tanpa mengindahkan potensi dampak negatif terhadap hubungan dengan Korea Selatan. Akibatnya, harapan untuk reunifikasi selama periode ini semakin jauh dari kenyataan, dengan kebijakan Korea Utara menjadi salah satu penghalang utama dalam proses tersebut.

Selain itu, tekanan internasional dan isolasi yang dialami oleh Korea Utara sebagai akibat dari program nuklirnya memperburuk situasi ekonomi dan sosial di negara tersebut. Namun, rezim Kim Jong-un memanfaatkan isolasi ini sebagai alasan untuk meningkatkan retorika kemandirian dan perlawanan terhadap imperialisme asing, memperkuat dukungan internal meskipun menghadapi tekanan eksternal yang besar.

Dengan demikian, Penulis menyimpulkan analisis ini menunjukkan bahwa kegagalan upaya reunifikasi tahun 2020-2024 di Semenanjung Korea disebabkan oleh kombinasi kepentingan nasional yang kuat, perlombaan senjata, ketegangan militer, serta faktor-faktor domestik dan internasional yang kompleks. Untuk mencapai perdamaian dan reunifikasi yang stabil, diperlukan kerja sama yang kuat, komitmen yang tinggi, dan upaya bersama dari semua pihak terkait, meskipun tantangan besar masih menghadang dalam mencapai tujuan tersebut.

6.2. Saran

Penelitian yang dimulai dari bab satu hingga bab enam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat umum. Namun, penulis juga berupaya memberikan rekomendasi untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih mendalam mengenai kebijakan Korea Utara dan reunifikasi antara Korea Utara dan Korea Selatan.

Rekomendasi untuk peneliti di masa mendatang mencakup penelitian tentang proses reunifikasi dengan melihat secara lebih rinci dan mempertimbangkan perubahan kepemimpinan yang terjadi. Selain itu, Karena fenomena sosial tidak hanya dapat dijelaskan dengan satu sudut pandang atau dengan satu metode analisis, penelitian yang akan datang dapat menjelaskan fenomena ini dengan berbagai sudut pandang dan memperbarui periode.